

## Penyidik KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kantor Kejaksaan

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya segera memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Hanya saja Alex mengaku belum dapat memastikan waktunya.

"Kapan waktunya ya saya enggak tahu, tapi saya kira secepatnya lah," kata Alex saat ditemui awak media di Gedung ACLC KPK, Kamis (18/8).

Terkait teknis pemeriksaan, kata Alex, pemeriksaan itu akan dilakukan Kejaksaan Agung. Sebab, Surya Darmadi saat ini berada di bawah penahanan Korps Adhyaksa.

Sebagaimana diketahui, Surya Darmadi sempat menjadi buron KPK dan Kejaksaan Agung, sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada

Senin (15/8). "Ke Kejaksaan, kan ditahan di Kejaksaan. Enggak masalah, kita berkoordinasi," ujar Alex.

Menurut Alex, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus suap revisi fungsi keputihan di Riau yang menjerat Surya Darmadi. Karena itu, KPK ke depan tinggal memeriksa Surya Darmadi sebagai tersangka.

Meski demikian, pihaknya tidak memungkiri akan memeriksa saksi lain. Hal ini bergantung pada kebutuhan penyidikan.

Ia mengatakan kemungkinan pemanggilan saksi lain juga bergantung kepada alat bukti. KPK tidak serta merta memanggil seseorang yang mungkin disebutkan Surya Darmadi dalam pemeriksaan.

● mei

## KPK Periksa Wakil Bupati Pemalang Terkait Kasus Suap Jual-Beli Jabatan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah agendakan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW), Kamis (18/8).

Selain itu, KPK juga memeriksa rombongan pejabat di Pemkab Pemalang lainnya sebagai saksi. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Rachman; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Suhirman; Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Mubarak Ahmad.

Kemudian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemalang, Bambang Haryono; Sekretaris Dinas Kominfo Pemalang, Joko Ngatmo; Kabid Pasar Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan Pemalang, Imam Fahrudin; Kabid Bina Marga Dinas PU dan Tata Ruang Pemalang, Abdul Muis.

Selanjutnya, Kabid Industri Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan Pemalang, Eko Wijayanto; Kabid SDA Dinas PU dan Tata Ruang Pemalang, Yuniar Teguh Santoso; Ibu Rumah Tangga, Susanti Utama; Karyawan BUMD, Arum; serta Pegawai Honoror, Sagita Budi Utomo.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang, Jalan Jenderal Sudirman Timur No 25, Wanarejan Utara, Taman, Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kab Pematang, atas nama tersebut," kata Pjt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (18/8).

## MA Kurangi Hukuman Lia Susanti Terkait Korupsi Masker di Banten

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Lia Susanti, menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

Sebelumnya, di tingkat Pengadilan Negeri (PN) majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Lia merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan 15.000 masker medis untuk penanganan Covid-19 yang merugikan negara Rp 1,6 miliar. MA menilai Lia terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan," tulis putusan Kasasi yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Serang, Kamis (18/8).

Adapun ini memperbaiki putusan pada Pengadilan Tinggi (PT) Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Serang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 29 November 2021. Putusan kasasi nomor perkara 2699 K/Pid.Su/2022

ini diambil oleh hakim ketua Desnayeti dan hakim anggota Soesilo pada Kamis, 30 Juni 2022.

Kasus korupsi ini bermula dari pengadaan sebanyak 15.000 helai masker medis jenis KN95 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinkes Banten. Masker ini dipergunakan untuk tenaga medis dalam penanganan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020.

Pemprov Banten kemudian mengalokasikan anggaran senilai Rp 3,3 miliar dari dana bantuan tidak terduga (BTT) tahap II Provinsi Banten. Namun, dalam proses pengadaan terdakwa Lia bersama terdakwa Wahyudin Firdaus selaku Direktur PT Right Asia Medika (RAM) Wahyudin Firdaus dan koleganya Agus Suryadinata, melakukan mark up harga satuan masker dari Rp 70.000 menjadi Rp 220.000 per buah.

Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa terdakwa Lia Susanti selaku PPK menunjuk PT RAM sebagai penyedia jasa pengadaan masker. Padahal, penunjukan PT RAM oleh Lia menyahai perundang-undangan yang berlaku. Sebab, PT RAM tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

● han

# 2 Polhukam

FOTO:ANT



## Jokowi Marah Besar karena Lambatnya Penanganan Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud mengatakan, pelecehan merupakan alibi karangan Sambo. Kendati karangan, Mahfud merasa alasan motif dugaan pembunuhan Brigadir J terkesan menjijikan.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah besar karena pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terkesan lambat.

Kemarahan Kepala Negara itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat diwawancarai Ahmad Faizal

melalui kanal youtubena. Sebelum rapat dengan presiden, Mahfud mengungkapkan ia bertemu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mengetahui arah Presiden Jokowi dalam kasus ini. Saat itu, kata Mahfud, Pramono Anung mengatakan Jokowi dengan tegas meminta kasus dibuka secara terang-benderang.

"Wuhhh tegas Pak, yakin

saya, Pak Presiden marah betul dan kenapa lama (penyelesaiannya)," kata Mahfud menirukan Pramono Anung saat bertemu dengannya.

Setelah berkomunikasi dengan Pramono Anung tersebut, Mahfud mengungkapkan ada rapat bersama Presiden Jokowi.

Saat itu, kata Mahfud, presiden meminta kasus tewasnya Brigadir J cepat diselesaikan supaya tidak menimbulkan isu macam-macam.

"Terus ada rapat lagi, saya ketemu presiden, diarahkan itu supaya jangan menimbulkan isu yang macam-macam, supaya cepat diselesaikan, jangan ada yang ditutupi," katanya.

Ketegasan Jokowi, kata

Mahfud, berlanjut kepada pemanggilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus diselesaikan dengan cepat. "Presiden manggil Kapolri diberitahu supaya diselesaikan, setelah Kapolri baru saya, jadi terpisah," ucapnya.

Menjijikkan

Mahfud menyebut kasus pembunuhan Brigadir J diduga bermotif sensitif karena hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Hal itu ia sampaikan usai Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka.

"Sebenarnya itu hasil pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang tersangka ini. Kata menjijikan maksud saya mereka menjelaskan pada penyidik, pada timsus bagaimana misalnya drama pelecehan itu,"

## KUNJUNGAN DUBES AUSTRALIA KE PARTAI NASDEM

Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh (tengah) bersama Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Penny Williams (kanan), Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate (kedua kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Kantor NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis (18/8). Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi Duta Besar perempuan pertama Australia untuk Indonesia itu yang diterima langsung Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh.

## KPU akan Gunakan Jasa Influencer untuk Tanggal Hoax di Sosial Media

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempertimbangkan menggunakan jasa endorse influencer untuk mensosialisasikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisioner KPU RI, August Mellaz di Kantor KPU RI Jakarta Pusat kepada awak media, Kamis (18/8).

Menurut August peran serta masyarakat khususnya warganet salam tahapan Pemilu 2024 amat penting. Hal ini melihat dari pengalaman dalam Pemilu 2019 dan bagaimana transmisi informasi yang berkembang terutama di media sosial yang lebih bebas.

"Yang kemudian kadangkadangkanya di sana (media sosial) agak biasanya lebih besar dibanding media-media mainstream yang kemudian ada mekanisme untuk memfilter, untuk mengclearin dan sebagainya," terang August Mellaz.

Contohnya terkait survei yang berkaitan dengan Pemilu 2024 akan diatur lebih jauh oleh penyelenggara Pemilu.

"Nah kalau survei dalam konteks pemilu, kalau survei dalam konteks sehari-hari yang memotret perilaku orang atau apapun itu ya monggo saja. Tapi kan ini dalam konteks partisipasi pemilu 2024 pada prinsipnya semua pihak tuntutannya harus ada transparansi," katanya.

Oleh sebab itu pihaknya tengah menjangkau warganet ini untuk kemudian kita libatkan dalam konteks partisipasi masyarakat. "Ini dalam rangka membantu KPU untuk menyebarluaskan juga informasi-informasi yang sebenarnya tentang pemilu dan tentu mereka kan punya kluster-kluster pemilih kan," tambah August Mellaz.

KPU RI kata dia tengah menyusun instrumen hukum yang dibangun untuk menjangkau perkembangan ke depan dalam bentuk kegiatan.

"Bentuknya seperti apa? Misalnya ternyata nanti sejumlah warganet yang misalnya saya enggak sebut famous tapi ya jaringannya luas, dampaknya signifikan mungkin bisa ketemu sama kita ngopi bareng untuk saling berbagi informasi, dan tukar menukar perkembangan," jelasnya.

Terkait endorse para influencer di media sosial, August Mellaz menyebutkan pihaknya belum sampai merencanakan sejauh itu ke arah sana. "Kalau endorse itu belum sampai ke sana. Itu nantilah. Endorse itu bagian dari kegiatan. Ini kan ada perkembangan masyarakat di luar kita yang memang harus kita jangkau," kata August Mellaz.

Untuk itu pihaknya saat ini tengah mengkaji secara mendalam PKPU dan pedoman teknis untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan tanpa dipengaruhi berita bohong yang kerap marak di media sosial.

● han

## Sah, Ashabul Kahfi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR

JAKARTA (IM) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi akhirnya resmi dilantik menjadi Ketua Komisi VIII DPR menggantikan Yandri Susanto.

Diketahui, Yandri telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Korkesra, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

Nampak hadir juga Yandri Susanto, dan sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR sep-

erti Ace Hasan Syadzily, Diah Pitaloka, dan Marwan Dasopang, serta anggota Komisi VIII DPR yang hadir secara fisik maupun virtual.

"Pimpinan yang saya hormati, hari ini sesuai dengan agenda rapat kita akan melakukan penetapan Ketua Komisi VIII DPR RI," kata Cak Imin mengawali rapat pelantikan.

Namun, pada akhirnya rapat dengan agenda pelantikan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum oleh Cak Imin.

Diketahui, Ashabul Kahfi merupakan politisi senior PAN, dan duduk sebagai Anggota Komisi VIII DPR juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN di Sulawesi Selatan.

● han

## Ini Alasan Brigjen NA Menembaki Kucing yang Berkeliaran di Sesko TNI

JAKARTA (IM) - Brigjen TNI NA mengaku menembaki sejumlah kucing hingga mati di lingkungan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat. Kejadian tersebut menjadi viral di media sosial.

NA beralasan, kucing-kucing tersebut ditembak karena ia ingin membersihkan lingkungan Sesko TNI dari kucing-kucing liar. Brigjen NA menembaki kucing dengan senjata angin miliknya.

Hal inilah yang membuat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa geram dengan tindakannya tersebut. Andika memerintahkan tim hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada Brigjen NA.

"Tadi malam Komandan Sesko TNI dan Tim Hukum TNI membenarkan bahwa Brigjen TNI NA (anggota organik Sesko TNI) telah menembak beberapa ekor kucing dengan menggunakan senapan angin milik pribadi," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Prantara Santosa, Kamis (18/8).

"Berdasarkan pengakuannya, Brigjen TNI NA melakukan tindakan ini dengan maksud menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan

tempat tinggal dan tempat makan Perwira Siswa Sesko TNI dari banyaknya kucing liar dan bukan karena kebebasan terhadap kucing," kata Prantara.

Tim Hukum TNI akan menindak lanjuti proses hukum Brigjen TNI NA, khususnya menyangkut Pasal 66 UU nomor 18 tahun 2009 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan).

"Dan Pasal 66A, Pasal 91B UU nomor 41 tahun 2014 (tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)," katanya.

● han



UJI PUBLIK PERATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU Anggota Komisioner KPU Mochammad Affudin (tengah) dan August Mellaz (kanan) menyampaikan presentasi Uji Publik terhadap Materi Muatan Rancangan Peraturan KPU Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota di Jakarta, Kamis (18/8). Rancangan Peraturan KPU tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis.

PT. TOP PONDASI INDONESIA  
Benedikdikan di Kabupaten Tangerang  
("Perseroan")  
**PENGUMUMAN**  
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham dalam Perseroan akan menjual dan mengalihkan sebagian besar saham miliknya kepada Pihak Ketiga ("Transaksi").  
Untuk memenuhi kewajiban pengumuman sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki keberatan atas Transaksi tersebut, dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini.  
19 Agustus 2022  
Direksi  
PT. TOP PONDASI INDONESIA  
Kosambi Barat, RT 003, RW 002  
Kosambi Barat, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten